

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tanda modernisasi masyarakat dunia, termasuk Indonesia adalah perkembangan alat pembayaran yang semakin pesat dan maju. Sampai saat ini uang telah mengambil peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan uang telah masuk ke segala aspek kehidupan manusia mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Sejarah uang telah mengalami perkembangan yang fundamental menyangkut bentuk, bahan dan penggunaannya.

Pada zaman pra sejarah, jenis uang seperti yang kita kenal sekarang belum ada. Pada zaman pra sejarah manusia melakukan jual beli dengan cara barter atau barang ditukar dengan barang. Sistem barter ini terbukti sangat efektif karena orang menjadi mudah untuk memiliki barang dan memenuhi kebutuhannya. Sistem barter telah membuat mereka sama-sama diuntungkan.

Setelah lama sistem bertukar atau barter berjalan dengan baik, munculah berbagai persoalan yaitu beberapa pihak merasa tidak mendapatkan pertukaran yang seimbang, sebaliknya pihak lain pun merasakan hal serupa. Sebagai akibat dari semua itu maka muncul ide untuk menggunakan alat pembayaran yang lebih pasti. Orang-orang membutuhkan sebuah alat pembayaran yang nilai tetap, mudah dibawa, berlaku untuk semua jenis barang, dan tidak mudah rusak. Setelah melalui perjalanan Panjang, berakhirilah masa sistem barter dan mulai ditemukan mata uang sebagai penggantinya. Satu tonggak sejarah yang sangat penting

lainnya adalah munculnya mata uang sebagai alat pembayaran resmi yang berlaku saat itu. (Ambarini, 2017, hlm. 1-3)

Uang merupakan alat yang akhirnya menjadi alat tukar mempunyai sejarah yang panjang. Bentuk uang pada awalnya merupakan suatu barang yang dapat disukai banyak orang dan jumlahnya pun terbatas. Perkembangan selanjutnya adalah logam dijadikan sebagai uang dalam bentuk, ukuran, dan berat yang berbeda-beda yang disebut juga sebagai uang logam (*metallic money*). Terbatasnya jumlah uang logam yang dapat digunakan untuk membuat uang, maka muncullah pemikiran untuk menciptakan uang dari bahan kertas. Terciptanya uang kertas tidak langsung melenyapkan uang logam, melainkan uang kertas dan uang logam berdampingan dalam sistem pembayaran.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu, bentuk uang semakin bervariasi. Uang kertas dan uang logam yang juga disebut sebagai uang kartal kemudian dilengkapi dengan uang giral dalam bentuk cek dan giro. Uang kartal dan uang giral dapat juga disebut sebagai uang tunai, yaitu dapat langsung digunakan sebagaimana fungsi uang. (Rivai, 2001, hlm. 4).

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang dalam fungsinya untuk penyelesaian transaksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat. Perkembangannya diawali dari pembayaran secara tunai berkembang dari uang yang berbentuk barang (*commodity money*), termasuk emas, hingga uang kertas dan logam yang dikeluarkan bank sentral (*fiat money*). Sementara itu, sistem pembayaran nontunai berkembang dari berbasis warkat (cek, bilyet giro dan sebagainya) sampai kepada berbasis elektronik (kartu dan

electronic money). Dengan perkembangan tersebut, peran sistem pembayaran menjadi semakin penting dalam perekonomian.

Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sebaliknya risiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancaran oleh suatu lembaga, dan umumnya dilakukan oleh bank sentral.

Sistem pembayaran yang aman dan lancar merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian stabilitas moneter dan keuangan yang merupakan tujuan utama dari bank sentral. Oleh karena itu, bank sentral pada umumnya terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan peraturan, penyelenggaraan, serta pengawasan dalam rangka mengontrol risiko likuiditas dan risiko kredit, maupun risiko yang bersifat sistemik. (Warjiyo, 2004, hlm. 209-210).

Perkembangan sistem pembayaran juga harus memerhatikan aspek perlindungan konsumen. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara umum masih belum optimal dirasakan manfaatnya oleh konsumen, khususnya pada saat melakukan kegiatan transfer dana. Oleh karena itu, pemerintah dan BI menggarap serius RUU Transfer Dana yang diajukan oleh pemerintah sebagai landasan dan perlindungan hukum yang setara bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer dana termasuk kegiatan transfer dana antara penyelenggara dan nasabah.

Dengan adanya UU Transfer Dana, masyarakat dapat dengan nyaman dan aman melakukan setiap aktivitas transfer dana yang kian hari kian meningkat. Sebagaimana diketahui, tujuan utama pendirian BI sesuai UU BI adalah untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar mata uang rupiah.

Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal memerlukan sistem perbankan yang sehat sebagai sasaran dan tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian moneter terutama dilakukan oleh BI melalui sistem perbankan nasional. Guna mendukung tujuan BI dalam menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah, diperlukan pengaturan dan pengelolaan kelancaran sistem pembayaran nasional. Kelancaran sistem pembayaran nasional perlu didukung infrastruktur yang andal dan memadai agar dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan moneter. Apabila kebijakan moneter berjalan dengan lancar, pada akhirnya dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Penggunaan uang tunai dalam sistem pembayaran banyak dipilih masyarakat karena alasan kebiasaan. Masyarakat sudah terbiasa bertransaksi menggunakan uang tunai. Namun, jenis transaksi tunai ini menimbulkan risiko jika nilainya sangat besar. Apabila semua pembelian barang/jasa menggunakan uang tunai, pelaku usaha harus menyimpan persediaan uang tunai dalam jumlah besar. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakanlah alat pembayaran nontunai yang pelaksanaannya melibatkan bank atau lembaga selain bank.

Sistem pembayaran nasional terus berevolusi sejalan dengan perkembangan zaman. Sejak teknologi ATM dan kartu kredit pertama kali

diperkenalkan di era-1980-an, ekosistem sistem pembayaran ritel nontunai Indonesia mampu tumbuh eksponensial. Namun demikian, capaian yang serba positif tersebut tidak selalu menempatkan Bank Indonesia (BI) pada zona nyaman. Berbagai tantangan datang silih berganti dan menuntut respon yaitu ekosistem sistem pembayaran ritel nasional belum efisien dan sangat tergantung pada peran asing. Interkoneksi dan interoperabilitas praktis belum terbentuk karena struktur industri yang terfragmentasi. Akibatnya, *economic* dan *social cost* dari perolehan akses non tunai menjadi relatif mahal, baik dalam bentuk tingginya biaya transaksi dan biaya investasi, maupun potensi kebocoran ekonomi dari hilangnya pendapatan pajak maupun *income transfer* ke luar negeri.

Pembayaran nontunai pada umumnya melibatkan jasa perbankan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat pada umumnya juga memberikan jasa lalu lintas pembayaran bagi para nasabah. Jasa lalu lintas pembayaran yang diberikan oleh bank antara lain melalui cek atau bilyet giro, penerbit kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik. (Purnomo, 2012, hlm. 11-14).

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang di masyarakat Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan lembaga bank maupun lembaga selain bank (LSB) dalam proses pengiriman dana, penyelenggaraan kliring, maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan oleh BI melalui sistem BI-RTGS (*Real Time*

Gross Settlement) dan sistem kliring nasional BI (SKNBI). Sistem BI-RTGS adalah muara bagi seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.

Hampir 95 persen transaksi keuangan di Indonesia yang bernilai besar dan bersifat mendesak seperti transaksi di pasar uang antarbank (PUAB), transaksi di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing (valas), serta *settlement* hasil kliring dilakukan melalui sistem BI-RTGS.

BI-RTGS sangat penting dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran nasional, sehingga harus dijaga kontinuitis dan stabilitasnya. BI juga menyempurnakan sistem kliring nasional BI (SKNBI) untuk meminimalkan risiko kredit pada kegiatan kliring debit. Penerapan prinsip *no money no game* pada proses perhitungan kliring debit yang baru, menuntut bank selalu menjaga kecukupan pendanaan awal agar dapat digunakan memenuhi kewajiban tagihan pembayaran dari bank lain. (Purnomo, 2012, hlm. 7-10).

Selanjutnya dengan adanya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Bank Indonesia terus mengupayakan transaksi nontunai, dukungan dan kemauan dari seluruh masyarakat Indonesia merupakan kunci keberhasilan budaya nontunai. Dari itu diperlukannya pelaku UMKM yang merupakan tokoh masyarakat yang paling mudah beradaptasi dengan perubahan serta keberhasilan transaksi nontunai ini. Untuk itulah melalui GNNT ini Bank Indonesia dan Gerakan Baru Indonesia (Genbi) serta pelaku UMKM yang akan mampu menjadi salah satu saluran informasi mengenai transaksi nontunai kepada masyarakat.

Pada triwulan I-2019, tingkat elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan yang terdiri dari Pemerintah Provinsi

dan 13 Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai 64% dari segi penggunaan SP2D daring (*online*), 59% dari segi elektronifikasi belanja daerah, dan 57% dari segi elektronifikasi pendapatan daerah. (Tri Setyoningsih, 2019, hlm. 52).

Guna meningkatkan layanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Perbankan syariah beberapa tahun terakhir sudah mengembangkan produk nontunai yang akad transaksinya tetap pada ajaran Islam.

Dengan masih adanya sistem pembayaran tunai yang sering menjadi kebiasaan sehari-hari dalam bertransaksi. Tetapi dengan perkembangan sekarang yang dimana sistem pembayaran nontunai dapat dilakukan dengan cepat dan mudah serta mengurangi uang palsu dan risiko perampokan.

Dari latar belakang tersebut, dari banyaknya karakter masyarakat di Kota Banjarmasin tentunya ada pro dan kontra. Disini saya ingin melihat masyarakat dalam pengetahuan, persepsi, dan sikap terhadap sistem pembayaran nontunai. Oleh karena itu saya mengangkat judul tentang **PENGETAHUAN, PERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI BANK SYARIAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Kota Banjarmasin terhadap sistem pembayaran nontunai bank syariah?

2. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Banjarmasin terhadap sistem pembayaran nontunai bank syariah?
3. Bagaimana sikap masyarakat Kota Banjarmasin terhadap sistem pembayaran nontunai bank syariah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kota Banjarmasin terhadap sistem pembayaran nontunai bank syariah
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Banjarmasin terhadap sistem pembayaran nontunai bank syariah
3. Untuk mengetahui sikap masyarakat Kota Banjarmasin terhadap sistem pembayaran nontunai bank syariah

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Agar hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai sistem pembayaran nontunai bank syariah pada Kota Banjarmasin
2. Agar hasil penelitian ini dapat menambah persepsi mengenai sistem pembayaran nontunai bank syariah pada Kota Banjarmasin
3. Agar hasil penelitian ini dapat melihat sikap masyarakat mengenai sistem pembayaran nontunai bank syariah
4. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta

sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan

5. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, bagi penulis maupun pihak lain.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka penulis sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud judul penelitian “Pengetahuan, Persepsi dan Sikap Masyarakat Kota Banjarmasin terhadap Sistem Pembayaran Nontunai Bank Syariah”.

Pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui/kepandaian ataupun segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud ialah, pengetahuan terhadap sistem pembayaran nontunai.

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan atau perlu diteliti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Menunjukkan adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interpenden (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu

sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. (Wikipedia, 2019). Dalam hal ini melakukan penelitian pada masyarakat di Kota Banjarmasin.

Sistem Pembayaran nontunai, instrumen pembayaran nontunai disediakan terutama oleh sistem perbankan. (Warjiyo, 2004, hlm. 241)

Bank Syariah, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. (Soemitra, 2009, hlm. 58).

E. Kajian Pustaka

Setelah penulis telah melakukan penelusuran, kajian penelitian yang serupa tidak ada. Namun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, berkaitan dengan menanggapi hanya mengkaji tentang alat pembayaran nontunai, sehingga ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang penulis teliti:

Penelitian yang dilakukan oleh Rubiyatul Adawiyah (2015) yang berjudul “Pengaruh Penggunaan *Electronic Money* Terhadap Volume Transaksi di Koperasi IAIN Antasari Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan *electronic money* berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap volume transaksi di koperasi IAIN Antasari Banjarmasin yaitu Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Pegawai Negeri Tarbiyah, Koperasi Syariah Dakkawah, dan Koperasi Mahasiswa (KOPMA). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 29 aryaawan koperasi, sedangkan penentuan sampel

menggunakan teknik sampling jenuh yang mana semua anggota populasi dijadikan sampel, jadi jumlah responden dalam penelitian ini 29 orang.

Penelitian yang dilakukan oleh Norain (2015) yang berjudul “Tingkat Kepuasan Mahasiswa/i IAIN Antasari Banjarmasin Terhadap Kartu Pembayaran Nontunai Brizzi”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan mahasiswa/i IAIN Antasari terhadap sistem pembayaran nontunai artu Brizzi yang mereka gunakan, ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang dominan melatar belakangi tingkat kepuasan mahasiswa sebagai pengguna kartu Brizzi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif tetapi dengan teknik pengumpulan data dengan kuesioner yang disebar secara acak (random). Hasilnya akan diolah dengan pengukuran skala likert, kemudian dianalisis dengan cara deskriptif. Dari hasil kuesioner kepada 100 responden diperoleh data mengenai gambaran tingkat kepuasan mahasiswa/i IAIN Antasari Banjarmasin yaitu dengan deminsi produk yang terbagi menjadi lima faktor yaitu kesesuaian kartu, daya tahan, keistimewaan tambahan, kemudahan produk dan estetika kartu Brizzi.

Penelitian yang dilakukan oleh Krtina Sari (2015) yang berjudul “Minat Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai *Electronic Money (E-Money)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin terhadap penggunaan alat pembayaran non tunai *Electronic Money (e-money)*. Jenis penelitian ini adalah field research, adapun sifat penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini

adalah seluruh mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini tidak seluruh populasi diambil, melainkan hanya sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan Disproportionate stratified random sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 119 orang.

Selain itu ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, berkaitan dengan persepsi, salah satunya penelitian Difi Dahliana berjudul Persepsi Nasabah Terhadap Peran BMT di Kota Banjarmasin yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap peran BMT sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah, ujung tombak pelaksanaan ekonomi syari'ah dan penghubung antara aghnia dengan dhuafa. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, persepsi dan sikap masyarakat Banjarmasin terhadap pembayaran non tunai (Dahliana, 2020).

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang memuat dan menggambarkan kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran hal yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang nanti akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian merupakan target yang dituju dari penelitian, definisi operasional yang merupakan definisi dasar untuk menunjang

dalam operasional penelitian, penelitian terdahulu yang merupakan acuan dasar dan sebagai perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini.

Pada bab II akan digali mengenai berbagai landasan teori yang berkenaan dengan hal yang akan diteliti.

Pada bab III terdapat berbagai metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai jenis, lokasi, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, dan teknik penganalisisan data.

Pada bab IV akan mengupas mengenai laporan hasil penelitian yang terdiri dari berbagai hasil penelitian lapangan, berbagai tinjauan lain dan analisis dari data yang dihasilkan pada saat penelitian lapangan.

Terakhir, yaitu bab V yang merupakan penutup yang didalamnya terdiri simpulan dari penelitian dan saran-saran.

